

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait rumusan masalah mengenai Penerapan *Good Governance* dalam Pengelolaan Zakat di BAZNAS Majalengka, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat oleh BAZNAS Majalengka mencakup aspek-aspek berikut:

a. Pengumpulan

Pengumpulan zakat oleh BAZNAS Majalengka dilakukan melalui berbagai saluran, antara lain pembayaran secara langsung, pemanfaatan platform digital, serta kolaborasi dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di instansi dan wilayah pedesaan.

b. Pendistribusian

Dana zakat disalurkan secara akurat kepada mustahik yang memenuhi kriteria, dengan mengacu pada data yang terpercaya dan melalui tahapan verifikasi yang ketat. Penyaluran tersebut juga mencakup program-program pemberdayaan ekonomi serta dukungan infrastruktur, seperti renovasi rumah tidak layak huni, agar manfaat zakat dapat dirasakan secara langsung dan berkelanjutan oleh penerima.

c. Pendayagunaan

BAZNAS Majalengka melaksanakan berbagai program pemberdayaan ekonomi, antara lain pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program ini bertujuan agar mustahik tidak sekadar menerima bantuan bersifat konsumtif, melainkan mampu mencapai kemandirian ekonomi dan bertransformasi menjadi Muzaki di kemudian hari.

2. BAZNAS Majalengka telah mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Governance* melalui beberapa indikator berikut:
 - a. Keterbukaan (*transparency*) yang diterapkan oleh BAZNAS Majalengka yaitu, BAZNAS Majalengka secara berkala menyampaikan laporan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat melalui laporan bulanan, semesteran, dan tahunan. Laporan keuangan tersebut tersedia untuk publik dan diaudit oleh auditor independen serta auditor syariah guna menjamin transparansi dan keterbukaan informasi.
 - b. Akuntabilitas (*Accountability*) yang diterapkan oleh BAZNAS Majalengka yaitu, Setiap proses pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan hingga penyaluran, dilakukan dengan tanggung jawab yang transparan kepada Muzaki dan mustahik. Pelaksanaan audit keuangan secara berkala semakin meningkatkan tingkat akuntabilitas Lembaga.
 - c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*) yang diterapkan oleh BAZNAS Majalengka adalah BAZNAS Majalengka memikul tanggung jawab untuk menyalurkan zakat secara tepat kepada penerima yang berhak, sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Kemandirian (*Independency*) yang diterapkan oleh BAZNAS Majalengka adalah menjalankan operasionalnya secara independen tanpa campur tangan dari pihak lain, sehingga pengelolaan zakat berlangsung secara objektif dan profesional.
 - e. Penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan (*Fairnes*) oleh BAZNAS berarti Penyaluran zakat dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip keadilan kepada mustahik yang memang memenuhi syarat, berdasarkan hasil verifikasi data dan pemeriksaan lapangan. Bantuan disalurkan tanpa diskriminasi, sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan dan kelayakan penerima.

B. Implikasi

Implikasi dari penelitian ini mengindikasikan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Majalengka berperan signifikan dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, serta keadilan dalam proses distribusi zakat. Hal ini berdampak positif terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat dan efektivitas pengelolaan zakat secara keseluruhan.

Dengan sistem tata kelola yang baik, BAZNAS Majalengka tidak hanya mampu memaksimalkan penghimpunan dan penyaluran zakat, tetapi juga dapat mendorong pemberdayaan mustahik secara lebih adil dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, penguatan nilai-nilai *Good Governance* menjadi strategi penting dalam mewujudkan pengelolaan zakat yang profesional, kredibel, dan mampu mendukung tercapainya tujuan sosial-ekonomi syariah untuk kesejahteraan umat.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat oleh pihak terkait, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Bagi BAZNAS Majalengka diharapkan terus memperkuat penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas, dengan menyediakan laporan keuangan yang mudah diakses publik dan diaudit secara berkala. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi perlu ditingkatkan guna mendukung efisiensi dalam pengelolaan serta pelaporan zakat. Untuk meningkatkan kualitas layanan kepada Muzaki dan mustahik, pelatihan bagi amil zakat sebaiknya dilakukan secara profesional dan selektif. Kerja sama yang solid dengan pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan lainnya juga menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi zakat, sehingga pengelolaannya dapat berlangsung lebih efektif, efisien, dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di Majalengka.

2. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Majalengka, disarankan agar memperluas fokus penelitian, misalnya dengan melakukan perbandingan antara BAZNAS Majalengka dan lembaga zakat di daerah lain. Selain itu, penambahan variabel seperti peran teknologi informasi serta tingkat partisipasi masyarakat dalam tata kelola zakat juga dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**